

Nomor dan Nama Kebijakan:

Nama Enumerator (Perangkat Daerah):

PERENCANAAN KEBIJAKAN								45			Nilai Riil	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence
								45			20,25		
								55			11,1375		
	Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikato	Ni*BI	2,784375	List bukti dukung Enumerator (Perangkat Daerah)	Evidence	
A1	Apakah kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang valid	Kebijakan tidak disusun berdasarkan data dan informasi (kajian/telaahan/penelitian/analisis kebijakan) yang valid	Dokumen konsultasi publik, risalah diskusi	Aktif Terlibat secara proaktif, dinamis, dan berkelanjutan dalam memberikan masukan bagi isu kebijakan Berkala Dilakukan lebih dari satu kali pertemuan Bersifat Administratif Keterlibatan pemangku kepentingan hanya dilakukan sebagai formalitas prosedural atau pemenuhan syarat administrasi, tanpa adanya partisipasi yang substansial, aktif, atau bermakna (tanpa umpan balik nyata dan tidak berkala atau insidental	A/B/C/D/E	B	40%	2,78438	1,11375				
		Kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi (kajian/telaahan/penelitian/analisis kebijakan) yang tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak memenuhi kaidah/standar baku											
		Kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi (kajian/telaahan/penelitian/analisis kebijakan) yang relevan, tetapi tidak kredibel, dan tidak memenuhi kaidah/standar baku											
		Kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi (kajian/telaahan/penelitian/analisis kebijakan) yang relevan, kredibel, tetapi tidak memenuhi kaidah/standar baku											
		Kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi (kajian/telaahan/penelitian/analisis kebijakan) yang relevan, kredibel, dan memenuhi kaidah/standar baku											
A2	Apakah pemangku kepentingan terlibat dalam perumusan kebijakan	Pemangku kepentingan tidak terlibat dalam perumusan kebijakan	Dokumen konsultasi publik, risalah diskusi		A/B/C/D	A	100%	2,78438	2,784375		RPJMD		
		Keterlibatan pemangku kepentingan bersifat administratif											
		Keterlibatan pemangku kepentingan hanya berasal dari stakeholder eksternal pemerintah tanpa melibatkan kelompok sasaran kebijakan											
		Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup stakeholder eksternal pemerintah dan kelompok sasaran kebijakan, tetapi tidak dilakukan secara aktif dan tidak berkala											
		Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup stakeholder eksternal pemerintah dan kelompok sasaran kebijakan dilakukan secara aktif dan berkala											
	Apakah analisis dampak kebijakan dilakukan sebelum	Kebijakan tidak didahului dengan analisis dampak kebijakan	Laporan Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment (RIA)/ROCCIPJ), atau bentuk laporan lainnya yang relevan										
		Kebijakan didahului dengan analisis dampak yang tidak memiliki relevansi terhadap rumusan kebijakan											

A	A3	implementasi	Kebijakan tidak memenuhi kaidah/standar baku yang tidak memenuhi kaidah/standar baku											
			Kebijakan didahului dengan analisis dampak yang memenuhi kaidah/standar baku, kredibel, tetapi hasilnya tidak digunakan dalam proses perumusan kebijakan											
			Kebijakan didahului dengan analisis dampak yang memenuhi kaidah/standar baku, kredibel, dan hasilnya digunakan dalam proses perumusan kebijakan											
		Indeks Aspek 1									6,6825	0,744263		
		Indeks Aspek 2									#REF!			
	Indeks Aspek 1 + Indeks Aspek 2								#REF!					
	B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN								55		24,75			
									10		2,475			
		Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikato	Ni*BI	1,2375	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
	B1	Apakah kebijakan memiliki kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya	Kebijakan tidak memiliki prosedur koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya	Dokumen Bispro/SOP, pedoman/kebijakan teknis implementasi		A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375		Perbup Kurma		
			Kebijakan memiliki prosedur koordinasi dan komunikasi yang tidak jelas dalam pelaksanaannya											
			Kebijakan memiliki prosedur koordinasi dan komunikasi yang tidak sesuai standar baku											
			Kebijakan memiliki prosedur koordinasi dan komunikasi yang sesuai standar baku, kredibel tetapi tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya											
Kebijakan memiliki prosedur koordinasi dan komunikasi yang sesuai standar baku, kredibel dan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya														
B2	Apakah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di Lapangan	Kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan	Laporan monitoring dan evaluasi		A/B/C/D	A	100%	0,744263438	0,744263438		Kerangka Hukum			
		Kebijakan diimplementasikan tetapi tidak sesuai dengan indikator kinerja, target sumber daya (Sumber Daya Aparatur dan Anggaran) dan target capaian kinerja												
		Kebijakan diimplementasikan sesuai dengan indikator kinerja, tetapi target sumber daya (Sumber Daya Aparatur dan Anggaran) dan target kinerja tidak tercapai												
		Kebijakan diimplementasikan sesuai dengan indikator kinerja, target sumber daya (Sumber Daya Aparatur dan Anggaran) dan tetapi target kinerja tidak tercapai												

3			Kebijakan diimplementasikan sesuai dengan indikator kinerja, target sumber daya (Sumber Daya Aparatur dan Anggaran) dan tetapi target capaian kinerja											
	B3	Apakah ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan	Tidak ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan (tidak melampirkan data dukung)	Laporan pengawasan , hasil audit kebijakan		A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375		Kerangka Hukum		
	Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tidak tersedia													
	Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersedia, tetapi tidak sesuai dengan standar baku dan kredibel													
	Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersedia, sesuai dengan standar baku, tetapi tidak kredibel													
	Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersedia, sesuai dengan standar baku, dan kredibel													
	Indeks Aspek 3										3,219263438			
	3 EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN							55						
								50		27,5				
								30		8,25				
		Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikato	Ni*BI	2,0625	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
	C1	Apakah kebijakan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan	Tidak pernah dilakukan evaluasi kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan	Laporan evaluasi tahunan, dokumen perubahan kebijakan		A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625		KAK Kurma		
	Evaluasi kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan tidak relevan													
	Evaluasi dilakukan secara rutin, tetapi tidak terstruktur, dan tidak digunakan untuk perbaikan kebijakan													
Evaluasi dilakukan secara rutin, terstruktur, tetapi tidak digunakan untuk perbaikan kebijakan														
Evaluasi dilakukan secara rutin, terstruktur, dan digunakan untuk perbaikan kebijakan														
C2	Apakah kebijakan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat	Kebijakan tidak memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat	Data capaian indikator kebijakan, survei kepuasan masyarakat, survei yang dilakukan oleh lembaga independen	Berisi deskripsi kelembagaan yang dibentuk dan lampiran dokumen legal terkait kelembagaan.	A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625		SK Tim			
		Kebijakan tidak memiliki data capaian indikator kebijakan, survei kepuasan masyarakat, atau survei yang dilakukan oleh lembaga independen												
		Kebijakan berdampak secara signifikan dan terukur, tetapi tidak memiliki bukti pengakuan dari pemangku kepentingan dan tidak memiliki bukti pengakuan dari lembaga independen												
		Kebijakan berdampak secara signifikan dan terukur, diakui oleh pemangku kepentingan, tetapi tidak memiliki bukti pengakuan dari lembaga independen												

			Kebijakan berdampak secara signifikan dan terukur, diakui oleh pemangku kepentingan, dan diakui oleh lembaga independen									
C3	Berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan, apakah kebijakan selaras dengan kebijakan lain yang relevan	Kebijakan tidak selaras dengan kebijakan lain yang relevan	Dokumen analisis/koordinasi keselarasan regulasi		A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625		Juknis	
		kebijakan tidak selaras dan tidak sinkron tetapi memiliki dokumen analisis yang menunjukkan keberlanjutan kebijakan										
		Kebijakan selaras, tetapi tidak sinkron dan tidak memiliki dokumen analisis yang menunjukkan keberlanjutan kebijakan										
		Kebijakan selaras, sinkron, tetapi tidak memiliki dokumen analisis yang menunjukkan keberlanjutan kebijakan										
		Kebijakan selaras, sinkron dan memiliki dokumen analisis yang menunjukkan keberlanjutan kebijakan										
Indeks Aspek 8									6,1875			
D. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							50		27,5			
							40		11			
	Tahapan/Pernyataan Kunci	Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikato	Ni*BI	5,5	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence
D1	Apakah informasi kebijakan dapat diakses oleh publik	Informasi tidak tersedia untuk publik	Publikasi kebijakan di situs/media sosial resmi, media massa (advertorial)		A/B/C/D	A	100%	5,5	5,5		Nota Dinas	
		Informasi kebijakan tidak dapat diakses oleh publik										
		Informasi kebijakan transparan, namun sulit diakses dan dalam format yang terbatas										
		Informasi kebijakan transparan, mudah diakses, namun dalam format yang terbatas										
		Informasi kebijakan transparan, mudah diakses, dan tersedia dalam berbagai format										
D2	Apakah ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau	Tidak ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan	Kanal aduan masyarakat, dokumentasi tanggapan terhadap masukan publik		A/B/C/D	A	100%	5,5	5,5		Nota Dinas	
		Terdapat mekanisme tetapi tidak jelas dan sulit diakses										
		Terdapat mekanisme yang jelas, tetapi sulit diakses										

		mengajukan keberatan	Terdapat mekanisme yang jelas, mudah diakses, tetapi tidak memiliki dokumentasi riwayat tanggapan atas masukan publik									
			Terdapat mekanisme yang jelas, mudah diakses, dan memiliki dokumentasi riwayat tanggapan atas masukan publik									

Petunjuk Pengisian:		
1.	Jawaban Pilihan:	Untuk pertanyaan yang sifatnya Enumerator (Perangkat Daerah) hanya dapat memilih 1 jawaban, maka pada kolom Jawaban, Perangkat Daerah harus memilih salah satu diantara A/B/C/D, karena masing-masing jawaban memiliki poin yang berbeda. A = 100% B = 70% C = 30% D = 10%
		Untuk pertanyaan yang sifatnya Enumerator (Perangkat Daerah) bisa memilih lebih dari satu jawaban: lebih atau sama dengan A, B, C, D, maka dapat dipilih keempatnya, ketiganya, keduanya, satu saja atau tidak sama sekali sesuai dengan kondisi kebijakan. A = 25% B = 25% C = 25% D = 25% Sehingga total 100%
2.	List Bukti Dukung Perangkat Daerah	Diisikan List atau daftar bukti dukung sesuai dengan kondisi eksisting kebijakan. Misal: - Naskah Kebijakan - Surat Keputusan - Surat Edaran - Peraturan Bupati - Dll
3.	<i>Evidence</i>	Diisikan bukti dukung kebijakan (Contoh: Link <i>Google Drive</i> yang dapat diakses, dan berisikan bukti dukung berupa file/data/dokumen, dll.